

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN PRODUK TERAPAN



**MODEL PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS PARTISIPATIF
DENGAN PERSPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN**

Dr. MOH ADENAN, MM.

Dra. SUSANTI PRASETIYANINGTIYAS, M.Si.

FAJAR WAHYU PRIANTO, SE, ME.

UNIVERSITAS JEMBER

November 2018

DAFTAR ISI

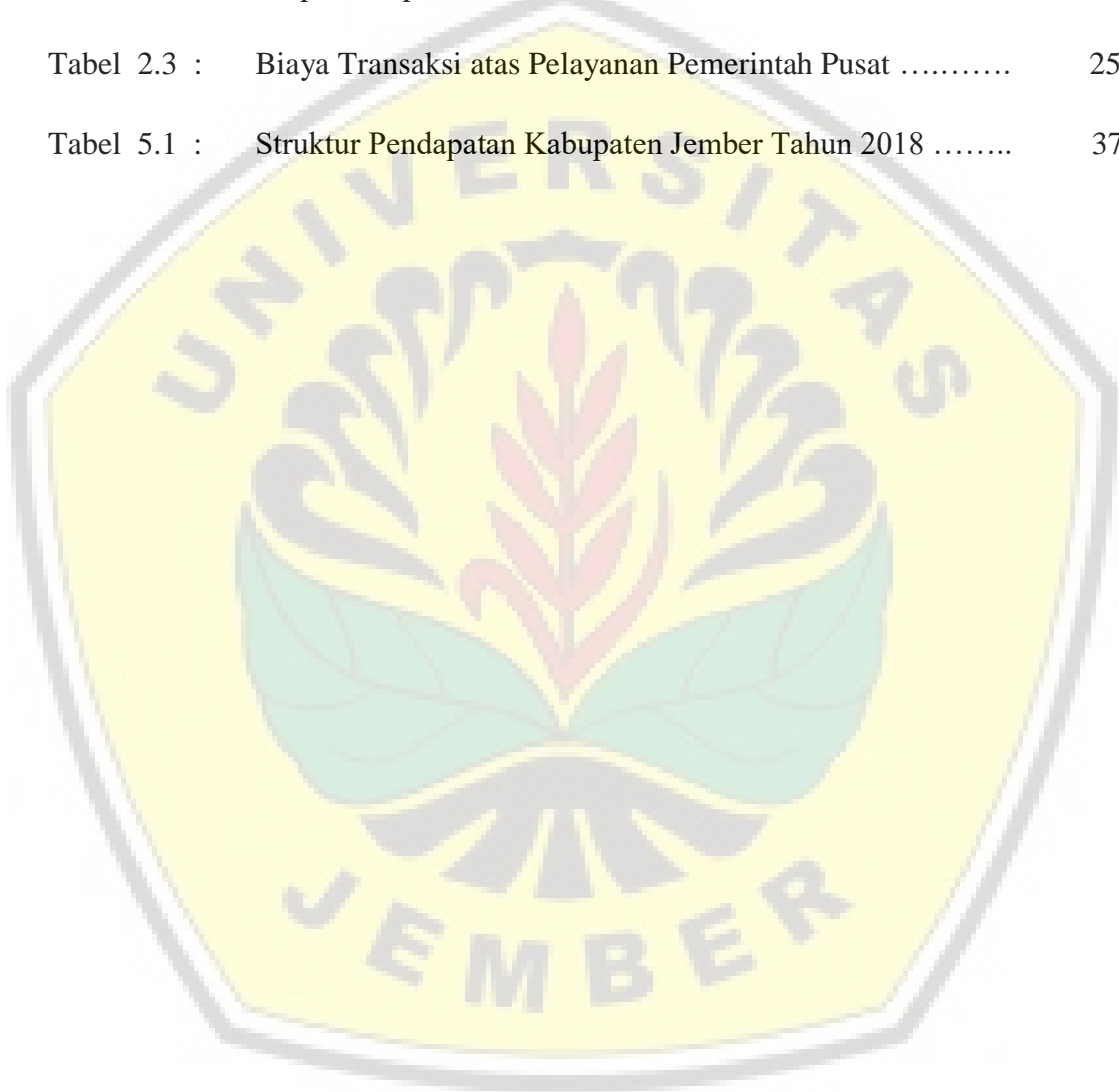
SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keterkaitan Penelitian dengan Kompetensi Ilmu	5
D. Kontribusi Dalam Pengembangan IPTEKS SOSBUD.....	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	6
A. State of the Art	6
B. Landasan Teori	8
C. Roadmap Penelitian	26
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	27
A. Tujuan Penelitian	27
B. Manfaat Penelitian	27
BAB 4 METODE PENELITIAN	28
A. Lingkup Penelitian	28
B. Lokasi dan Obyek Penelitian	28
C. Data dan Metode Pengumpulan Data	30
D. Teknis Analisis Data	31
BAB 5 HASIL YANG DICAPAI	33
A. Peranan Modal Sosial dalam Proses Penganggaran di Kab. Jember	33
1. Bentuk-bentuk Modal Sosial dalam Perencanaan Pembangunan ...	33
2. Peranan Modal Sosial dalam Penyusunan APBD	36
B Peranan Modal Sosial dalam Penyusunan APBD	52

BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	56
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	59



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Dimensi Struktur dan Kognisi Modal Sosial	17
Tabel 2.2 : Empat Perspektif Modal Sosial	20
Tabel 2.3 : Biaya Transaksi atas Pelayanan Pemerintah Pusat	25
Tabel 5.1 : Struktur Pendapatan Kabupaten Jember Tahun 2018	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Keterlibatan Aktor-aktor Penganggaran Partisipatif	2
Gambar 2.1	Cabang Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru	8
Gambar 2.2	Hubungan antra Jembatan Modal Sosial	18
Gambar 3.1	Diagram Alir Proses Penyusunan Model Perencanaan berbasis Partisipatif	29
Gambar 5.1	Alur Penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan APBD.	52



RINGKASAN

Perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran dalam keseluruhan siklus anggaran. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk memahami peranan modal sosial dalam proses penganggaran di Kabupaten Jember; dan (2) Untuk menyusun model perencanaan partisipatif di Kabupaten Jember. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah keilmuan dalam ilmu ekonomi kelembagaan yang lebih holistik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena fenomena anggaran bersifat holistik dan saling kait mengkait yang melibatkan aktor-aktor dari elemen-elemen masyarakat sehingga pembahasan anggaran sangat dinamis. Peranan modal sosial dalam proses penganggaran sangat efektif sebagai model yang keberadaannya nyata tetapi secara eksplisit kurang bisa dinyatakan, karena pendekatannya melalui jalur informal;

1. Model Perencanaan berbasis Partisipatif di Kabupaten Jember adalah kondisi ideal, namun tidak bisa diimplementasikan karena banyak kendala terkait dengan :
 - a. Aturan mainnya masih belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - b. Proses penyusunan akan menjadi lebih panjang dan lama untuk melibatkan semua komponen anggota masyarakat walaupun dalam bentuk kelompok-kelompok maupun asosiasi profesi;
 - c. Ada sebagian peserta FGD menyatakan bahwa bentuk partisipasinya telah dilakukan oleh DPRD dimana secara empiris sebenarnya pendapat ini tidak selalu benar.

BAB 7 **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

1. Peranan modal sosial dalam proses penganggaran sangat efektif sebagai model yang keberadaannya nyata tetapi secara eksplisit kurang bisa dinyatakan, karena pendekatannya melalui jalur informal;
2. Model Perencanaan berbasis Partisipatif di Kabupaten Jember adalah kondisi ideal, namun tidak bisa diimplementasikan karena banyak kendala terkait dengan :
 - a. Aturan mainnya masih belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - b. Proses penyusunan akan menjadi lebih panjang dan lama untuk melibatkan semua komponen anggota masyarakat walaupun dalam bentuk kelompok-kelompok maupun asosiasi profesi;
 - c. Bentuk partisipasinya telah dilakukan dan diwakili oleh DPRD, namun dalam konsep anggaran berbasis partisipatif belum dilaksanakan sesuai dengan konsep teori ekonomi kelembagaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun saran berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkaya pemahaman teori, model penelitian kualitatif dengan memunculkan ekonomi kelembagaan.
3. Diharapkan konsep berpikir dan hasil-hasil studi ini dapat menambah referensi dan membuka wacana penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agen theory. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. 2001. Corruption: A review of contemporary research. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001: 7. Web: <http://www.cmi.no>.
- Christensen, Jorgen Grønnegard. 1992. Hierarchical and contractual approaches to budgetary reform. *Journal of Theoretical Politics* 4(1): 67-91.
- Deller, Steven, Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. Wisconsin local government, state shared revenues and the illusive flypaper effect. University of Wisconsin-Madison, *Working Paper*.
- Dendi, Astia dan Arif Roesman, 2005, “Mengembangkan Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif di Daerah”, GTZ Promis-NT, Makalah yang disampaikan pada Forum Regional FPPM di Lombok tahun 2005.
- Dobell, Peter & Martin Ulrich. 2002. Parliament’s performance in the budget process: A case study. *Policy Matters* 3(2): 1-24.
- Elgie, Robert & Erik Jones. 2000. Agens, Principals and the Study of Institutions: Constructing a Principal-Centered Account of Delegation. *Working documents in the Study of European Governance* Number: 5. Center for the Study of European Governance (CSEG).
- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. Governmental and Nonprofit Accounting— Theory and Practice. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Garamfalvi, L. 1997. *Corruption in the public expenditures management process*. Paper presented at 8th
- Halim, Abdul. 2002. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Disertasi.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.

- Havens, Harry S. 1996. Budgeting and policy-making by the legislature in the United States. *Budgeting and Policy Making SIGMA Papers* No. 8, Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Hyde, Albert C. & Jay M. Shafritz. (Eds.) 1978. *Government Budgeting: Theory, Process, and Politics*. Oak Park, Illinois: Moore Publishing Company, Inc.
- Jaya, Wihana Kirana. 2005. Dysfunctional institutions in the case of local elite behaviour in decision-making about local government budgets in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 20(2): 120-135.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martinez-Vazquez, Jorge, F. Javier Arze, & Jameson Boex. 2004. Corruption, Fiscal Policy, and Fiscal Management. Working Paper, Georgia State University. <http://www.fiscalreform.net>
- Kementerian Keuangan. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110/2000 tentang Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- _____. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- _____. 2004a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- _____. 2004b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Riyadi, D.S. Bratakusumah. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Veblen. 2007. *The Theory of the Leisure Class*. Oxford University Press.

Widodo, Tri, 2006, *Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah – Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Yuhertiana, I. 2003. *Principal-agen theory dalam proses perencanaan anggaran sektor publik*. *Kompak – Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Sistem Informasi* (September-Desember): 403-422.

Yustika, Ahmad Erani, 2007, *Perekonomian Indonesia*. Malang: BPFE.
_____. 2008, *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayu Media.
_____, 2016, *Ekonomi Kelembagaan*, diakses online pada tanggal 8 September 2016 di <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Ahmad-Erani-Yustika-Ekonomi-Kelembagaan-7608-id.html>.

